



**PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP PERUBAHAN
UPAYA PENANGANAN DEFORESTASI BRASIL DI AMAZON**

Maria Aurelia Pramitha, Muhammad Faizal Alfian, S.IP., M.A.

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website: [http://
www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Amazon are being destroyed every year due to land conversion and fires. Brazil has committed to reduce deforestation rates with various policies. Unfortunately, since Jair Bolsonaro took office as President of Brazil in 2019, the commitment to reduce deforestation of the Amazon has been faded. Commitment shifting is indirectly driven by international trade carried out by multinational corporation, especially multinational corporation which engaged in the global supply chain for cattle ranching and soybean agriculture, both of these sectors are contribute to the majority of deforestation in the Amazon. This study presents the formulation of the problem is "What is the role of multinational corporation in Brazilian policy changes in the forest management and deforestation of the Amazon?". By using dependency theory, this study argues that Brazil as a developing country is under the shadows of the interests of multinational corporation due to inequality, inevitably the government accommodate these interests in changing policies to expand the expansion of multinational corporation in the Amazon, especially those related to the exploitation of natural resources and deforestation. This research is a qualitative research using descriptive research type. This research finds that inequality in global capitalism brings exploitative development in Brazil, especially to deforestation for commercial land conversion and this condition is accommodated by the Brazilian government under Jair Bolsonaro.

Keywords: *Deforestation, Dependency, Jair Bolsonaro, Brazil, Multinational Corporation, MNC*

PENDAHULUAN

Isu lingkungan telah menjadi ancaman baru bagi negara sebagai aktor internasional. Isu lingkungan kemudian mendapat porsi perhatian yang lebih dari masyarakat internasional setelah mencuatnya isu pemanasan global. Ancaman global tersebut diakibatkan oleh permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas dimana kerusakan lingkungan suatu negara dapat mempengaruhi kawasan dan negara sekitarnya. Keadaan bumi semakin memburuk akibat adanya aktivitas perekonomian manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang paling mendesak saat ini adalah deforestasi dan degradasi hutan sebagai salah satu penyebab pemanasan global. Tingginya eksploitasi sumber daya alam, termasuk deforestasi dan degradasi hutan hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akibatnya hutan terus menghilang tanpa dilakukan penanaman kembali (Subramanian, 2018).

Hutan Amazon merupakan hutan hujan terbesar dan dijuluki sebagai paru-paru dunia yang dapat membantu menyimpan cadangan oksigen dan menjaga suhu dunia. Brasil mendapatkan sekitar 60 persen dari keseluruhan wilayah hutan hujan Amazon harus mengalami deforestasi dan degradasi yang memiliki konsekuensi bagi iklim dan curah hujan global (BBC News, 2020). Hutan hujan Amazon sangat penting untuk iklim Bumi karena perannya dalam mengatur atau menyeimbangkan iklim regional dan global. Selain itu, Amazon juga menyimpan karbon dalam jumlah besar. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon dilepaskan ke atmosfer, berkontribusi terhadap pemanasan global (Greenpeace, 2023).

Deforestasi hutan Amazon sudah terjadi sejak 1960-an hingga awal 2000-an untuk pembangunan. Namun dunia dan pemerintah Brasil sendiri sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelangsungan hutan, sehingga di bawah kepemimpinan Lula da Silva pada tahun 2003 memutuskan untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui *Action Plan for Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon*, Lula da Silva berusaha untuk menguatkan pembangunan berkelanjutan dan deforestasi terbukti semakin menurun (West dan Fearndise, 2020). Namun, data tahunan dari PRODES (*Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas*, atau *Program to Calculate Deforestation in the Amazon*) yang dirilis pada November 2020 oleh *Brazil's National Space Research Institute* (INPE),

menunjukkan bahwa hutan Amazon telah mengalami kerusakan terparah dalam 12 tahun terakhir sejak tahun 2008. Pada tahun 2020, deforestasi naik menjadi 9,5 persen dari tahun sebelumnya, sebesar 11.088 kilometer persegi atau 7 kali ukuran kota London (Al Jazeera, 2020).

Sejak Brasil menjadi negara dengan produksi dan ekspor dalam bidang agrikultur pertanian kedelai dan industri daging sapi yang besar, hutan Amazon terus mengalami deforestasi. Ditambah lagi pembukaan dan pengalihfungsian lahan menjadi lahan pertanian dan peternakan menjadi penyebab utama deforestasi hutan Amazon. Di balik itu terdapat perusahaan multinasional (MNC atau *Multinational Corporation*) yang secara tidak langsung memiliki peran besar dalam deforestasi hutan Amazon, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian dan peternakan. Keberadaan perusahaan multinasional sendiri menimbulkan suatu paradoks. Di satu sisi, perusahaan multinasional memiliki kekuatan ekonomi besar yang sangat dibutuhkan oleh negara berkembang untuk menyokong pertumbuhan ekonominya. Namun di satu sisi, keberadaan perusahaan multinasional justru membawa ancaman bagi lingkungan hidup dan bahkan berpotensi merugikan negara berkembang itu sendiri.

Selain itu, angka deforestasi meningkat dengan terpilihnya Jair Bolsonaro sebagai Presiden Brasil pada tahun 2019 yang mendukung pembangunan ekonomi yang tidak ramah lingkungan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Deforestasi hutan Amazon melonjak 88 persen di pertengahan tahun 2019, atau ketika Presiden Jair Bolsonaro mulai menjabat (Reuters, 2019). Selama masa kampanyenya, secara terang-terangan Jair Bolsonaro mengungkapkan bahwa ia mendukung pembukaan lahan di kawasan lindung. Setelah terpilih, Jair Bolsonaro menepati janji kampanyenya untuk melemahkan lembaga lingkungan yang mengawasi dan bertanggung jawab atas hutan Amazon dan melonggarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan deforestasi (tempo.co, 2019).

Hal ini menjadi angin segar bagi pelaku deforestasi untuk memperlus produksi menuju Amazon, dengan dibarengi efek negatif pada konservasi hutan Amazon. Deforestasi dengan membakar hutan di tahun 2019 merupakan salah satu contoh bagaimana koneksi tidak langsung dari pelaku agrikultur kedelai dan

industri daging sapi mencoba untuk memanfaatkan dan mengambil celah dari kelemahan kebijakan pemerintah Brasil. Pemerintah pun dihadapkan pada kebijakan dilematis, antara mementingkan ekonomis atau ekologis dan pembangunan atau penghancuran.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik penelitian hampir serupa untuk dijadikan sebagai referensi. Penelitian terdahulu pertama yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah skripsi yang berjudul “Diplomasi Greenpeace Dalam Menekan Angka Deforestasi Amazon” yang ditulis oleh Kartika Yustika Mandala Putri (2016). Penelitian tersebut menekankan pada upaya dan tindakan Greenpeace sebagai NGO dengan menginisiasikan kebijakan moratorium kedelai kepada Pemerintah Brasil. Kemudian, referensi kedua adalah skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Investasi Asing Era Bolsonaro Terhadap Deforestasi Hutan Amazon” yang ditulis oleh Muhammad Isfandiar Hatami (2019). Penelitian tersebut menekankan pada pemerintah Brasil era Jair Bolsonaro yang mempermudah akses investasi asing terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam di Hutan Amazon dengan dalih untuk kepentingan nasional. Terakhir, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah skripsi dengan judul “Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brasil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkungan Global” oleh Nurul Husna (2022). Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri pada era Bolsonaro terutama yang berkaitan dengan lingkungan.

Dari beberapa referensi tersebut, terdapat kekosongan penelitian dalam aspek bagaimana teori ketergantungan dalam melihat peran perusahaan multinasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan lingkungan Brasil terutama terkait dengan deforestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan bertipe deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan mengenai perubahan kebijakan Brasil dalam mengatasi deforestasi yang di dorong oleh aktivitas perusahaan

internasional. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana data yang diperoleh dan dikumpulkan berasal dari sumber yang sudah ada (Hasan, 2002), sehingga jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Penelitian ini membuktikan keterkaitan antara teori dengan hipotesis dalam metode kongruen atau metode sebangun dalam menganalisis dan mengintrepetasikan data. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini membuktikan keterkaitan adanya deforestasi yang terjadi di Hutan Amazon didorong oleh akumulasi kapital dan ekspansi perusahaan multinasional sebagai perpanjangan tangan negara maju dalam ketergantungan, di sisi lain pemerintahan Brasil era Jair Bolsonaro berusaha memfasilitasi kondisi tersebut melalui perubahan kebijakan untuk melemahkan upaya penanganan deforestasi.

KERANGKA TEORI

Teori ketergantungan atau dependensi merupakan teori yang memberikan penjelasan teoritis mengenai ketimpangan pembangunan antara negara-negara maju atau yang sering diidentifikasi sebagai Negara Utara atau negara inti (*core*) dan negara-negara berkembang atau yang sering diidentifikasi sebagai Negara Selatan atau negara pinggiran (*periphery*). Ketergantungan melihat keterbelakangan sebagai hasil ketimpangan atau hubungan ekonomi yang tidak seimbang antara ‘inti’ dan ‘pinggiran’ (Valenzuela, 1978).

Definisi ketergantungan yang paling ringkas dan sering dikutip diambil dari Theotonio Dos Santos (1970, dalam Hettne 1990: 157) yang mengemukakan bahwa ketergantungan merupakan situasi ‘yang mengkondisikan’, dimana ekonomi sekelompok negara ditentukan oleh pembangunan dan perkembangan negara atau kelompok lain. Melalui pemikiran Dos Santos, negara dapat berkembang hanya sebagai bayangan perkembangan negara dominan, yang dimana dapat memberi pengaruh positif maupun negatif di masa depan pada pembangunan negara yang bergantung. Literatur ketergantungan lain berasal dari Cardoso dan Faletto (1979) yang memberikan pengertian mengenai ketergantungan sebagai keterkaitan antara kekuatan eksternal dan internal sebagai pembentukan keseluruhan yang kompleks.

Namun teori tidak bisa terlepas dari kritik, begitu pula dengan teori ketergantungan. David Ray (dalam Namkoong, 1999) berargumen bahwa ketergantungan tidak hanya disebabkan oleh kapitalisme semata, dan para ahli cenderung untuk mengabaikan kemungkinan lain yang lebih komprehensif. Ketergantungan juga terlalu menyederhanakan hubungan ekonomi global dan ketidakmampuan teori untuk menawarkan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi negara berkembang (Hettne, 1990). Relevansi ketergantungan semakin disesuaikan dengan adanya pergeseran ekonomi politik internasional. Teori ketergantungan hari ini dapat digunakan menjelaskan penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam yang sembrono dan masif, krisis keuangan yang berulang, dan semakin melebarnya ketidaksetaraan global antara Selatan dan Utara. Fakta bahwa negara berkembang secara tidak sadar masih di eksploitasi oleh negara maju melalui hubungan ekonomi timpang, seperti melalui mekanisme syarat perdagangan, investasi asing maupun pinjaman. Bergantungnya ekspor negara berkembang untuk memenuhi permintaan negara maju dan dinamika ekonomi diciptakan melalui hubungan ini menjadi salah satu alasan teori ketergantungan masih relevan hingga saat ini (Centeno, 2017).

Osvaldo Sunkel juga menekankan pada struktur perdagangan internasional, dimana negara berkembang mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang manufaktur, sebagai penyebab keterbelakangan di negara berkembang (Namkoong, 1999). Selain itu, kapitalisme telah jauh lebih terorganisir di tangan perusahaan multinasional serta lembaga keuangan yang sering berperan untuk mendominasi ekonomi negara yang lebih lemah.

PEMBAHASAN

Dinamika Laju Deforestasi Hutan Amazon

Brasil sendiri memegang sekitar sepertiga bagian dari seluruh hutan tropis yang ada di muka bumi, termasuk di dalamnya mayoritas hutan Amazon. Karenanya hal ini menyebabkan lahirnya tanggung jawab secara tidak langsung bagi Brasil terhadap kelestarian hutan Amazon sebagai paru-paru dunia. Hutan Amazon di Brasil telah mengalami perubahan tutupan hutan yang cepat dalam

beberapa dekade terakhir. Hal ini sendiri menjadi salah satu tantangan terbesar bagi konservasi hutan global. Lebih dari 780 ribu kilometer persegi area hutan Amazon telah hilang dalam 30 tahun terakhir (Skidmore, Moffette, Rausch, Christie, Munger, dan Gibbs, 2021).

Laju deforestasi ini dimulai pada tahun 1960-an, dimana Pemerintah Brasil mulai melakukan upaya pembangunan nasional dan konektivitas dengan membuat kebijakan ekspansi menuju hutan Amazon nama *National Integration Plan*. Kebijakan ini memiliki tiga tujuan utama yaitu: pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan yang membelah hutan Amazon, pengalihfungsian lahan di daerah selatan dan tepi timur Brasil, dan program dorongan fiskal yang memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih besar dalam kegiatan Amazon (Le Tourneau, 2016). Di tahun 1980-an hingga 1990-an tren deforestasi mulai berjalan stagnan ketika pemerintah melakukan pembangunan jalan dan program pemukiman (Soler, Verburg, dan Alves, 2014).

Sejak tahun 2005 angka tahunan deforestasi mulai mengalami penurunan dan menunjukkan angka yang konsisten. Hal ini dapat tercapai dengan adanya pembentukan *The Action Plan for the Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon* (PPCDAm) pada tahun 2004, sehingga tren penurunan deforestasi yang konsisten menunjukkan bahwa komitmen Brasil mulai berjalan. Namun komitmen ini tidak berjalan lama sejak tren deforestasi kembali meningkat pada tahun 2013, dan kondisi ini mulai mengalami signifikansi pada tahun 2019. Terutama di tahun 2020, Brasil mendapatkan sorotan dari dunia karena kebakaran hebat di Hutan Amazon dengan lebih dari 2.500 titik kobaran api antara 28 Mei hingga 3 November 2020 yang dirilis oleh *Monitoring of the Andean Amazon Project* (MAAP). Mayoritas kebakaran yang dideteksi oleh MAAP merupakan kebakaran ilegal tidak alami atau sengaja disebabkan oleh manusia untuk membersihkan lahan dengan lebih cepat (Kimbrough, 2021). Peningkatan tajam ini dinilai banyak pengamat dan organisasi non pemerintah sebagai akibat dari naiknya Presiden Jair Bolsonaro pada Januari 2019. Deforestasi ini terjadi akibat dua sektor yang memiliki peran besar dalam pengalihfungsian lahan komersil, terutama dalam sektor perternakan sapi dan pertanian kedelai.

Saat ini, Brasil menjadi negara produsen daging sapi yang besar di dunia. Produksi daging sapi Brasil pada tahun 2020 sendiri mencapai 10,1 juta ton, dengan 20 persennya dikirim untuk ekspor (Kompas.com, 2022). Menurut *Brazilian Beef Exporters Association*, dari tahun 2010 hingga 2017 ekspor daging sapi terus mengalami peningkatan 25 persen. Bahkan *United States Department of Agriculture (USDA)* memperkirakan bahwa jika Brasil tetap memperhatikan hal ini, maka pertumbuhan eksportnya dapat mencapai 2,9 juta ton atau 23 persen dari total ekspor daging global pada tahun 2028 (Chain Reaction Research, 2020). Namun disisi lain, perkembangan ekspor daging sapi Brasil menjadi penyebab utama dari deforestasi, terutama di Hutan Amazon (WWF, 2021).

Selain dari komoditas ekspor daging sapi, komoditas ekspor kedelai juga terkait dengan masifnya deforestasi yang terjadi di Brazil. Permintaan akan kedelai diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu komoditas pertanian untuk membuat tempe makanan khas Indonesia yaitu kedelai memang selalu menarik diperbincangkan. Kedelai memang kerap diolah menjadi bahan makanan mulai dari tahu, tempe, susu, kecap, hingga minyak (CNBC, 2023). Selain itu, kedelai juga digunakan oleh peternak sapi potong, sapi perah, babi, dan unggas di Eropa serta dunia sebagai pakan ternak (The Guardian, 2022). Di periode 2019 hingga 2020 ekspor kedelai Brasil mencapai 13,3 persen atau hampir dua kali lipat rata-rata tingkat ekspor negara lain dengan produksi yang sama. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor ini dibarengi dengan pengalihfungsian untuk lahan pertanian kedelai.

Perkembangan Upaya Brasil dalam Menangani Deforestasi Hutan Amazon

Brasil melakukan langkah-langkah penting untuk mencegah meningkatnya angka deforestasi melalui berbagai kebijakan. Salah satu langkah paling penting dalam pengurangan angka deforestasi adalah *Action Plan for the Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon (PPCDAm)* pada tahun 2004. PPCDAm lahir dengan tujuan untuk mengurangi laju deforestasi secara berkala dengan tetap memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini memiliki empat fase dan berkembang seiring dengan perubahan pola deforestasi

yang terjadi di Amazon, namun tetap dengan serangkaian komponen utama seperti pemantauan dan pengendalian lingkungan, perencanaan lahan, sistem penegakan hukum, serta mendukung produksi yang berkelanjutan (West dan Fearndise, 2020).

Untuk mengatasi deforestasi secara spesifik, dibawah kebijakan PPCDAm hadir Moratorium Kedelai pada tahun 2006 untuk menjaga hutan Amazon dari rantai pasok kedelai terkait deforestasi dengan tidak membeli dan memperdagangkan kedelai yang dihasilkan dari lahan yang dibuka dalam area hutan setelah Juli 2006. Selain dari kedelai, industri daging sapi juga mendapat perhatian dengan dibentuk kesepakatan ‘*Terms of Adjustment of Conduct – TAC da Carne*’ (selanjutnya disebut sebagai TAC). TAC bertujuan untuk melarang penjualan daging sapi yang dihasilkan dari lahan ilegal baik karena deforestasi maupun karena persyaratan hukum lain yang belum terpenuhi. Dibawah kesepakatan ini, ternak yang berasal dari lahan yang dibuka di area hutan Amazon setelah Juli 2008 tidak boleh dilakukan pemotongan dan dipasarkan (Carvalho et al., 2019).

Analisis Ketergantungan Aktivitas Perusahaan Multinasional Terhadap Pembangunan Brasil dan Deforestasi Hutan Amazon

Rantai Pasok Global (*Global Supply Chain*) merupakan suatu jaringan yang melibatkan aktor bisnis, individu, organisasi yang bekerja sama untuk membuat dan mendistribusikan suatu produk atau layanan kepada pelanggan atau pembeli. Hal ini juga melibatkan berbagai kegiatan seperti produksi, pengelolaan, pengolahan, transportasi, distribusi, pemasaran, dan ritel. Sehingga struktur rantai pasok dan perusahaan yang terlibat pada setiap tahap menjadi sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan (Quaralia, 2022).

Peternakan sapi mayoritas mendapat sokongan dari perusahaan multinasional. Mulai dari segmen paling awal yaitu pakan ternak sapi dipegang oleh mayoritas perusahaan multinasional yaitu Cargill dan DSM. Cargill berasal dari Amerika Serikat sedangkan DSM berasal dari Belanda. Keduanya memproduksi 15 juta ton pakan ternak setiap tahun, dan 20 persennya diperuntukkan ke pangsa pasar Brasil. Dalam segmen kesehatan hewan ternak di Brasil, sebagian besar juga

dipegang oleh 4 perusahaan multinasional seperti MSD, Zoetis, Boehringer Ingelheim dan Elanco, dimana keempatnya memiliki hak paten atas obat-obatan yang digunakan dalam kesehatan ternak. MSD merupakan cabang dari perusahaan farmasi Amerika Serikat, Merck Animal Health. Selain itu, Zoetis juga merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam kesehatan hewan asal Amerika Serikat. Keempat perusahaan tersebut memegang 80 persen dari pangsa pasar untuk kesehatan hewan ternak terutama sapi di Brasil (Corcioli, Medina, dan Arrais, 2022).

Segmen yang paling menjadi sorotan dari terkait dengan deforestasi adalah segmen pemasaran, rumah pemotongan ternak dan pengepakan daging sapi. peternakan sapi potong lebih disoroti soal penggunaan lahan ternak, pakan ternak, dan bahkan padang rumput yang digunakan oleh pengembala ternak menjadi permasalahan karena berbasis deforestasi, terutama di Hutan Amazon. Peternakan sapi menjadi pendorong utama kehancuran hutan Amazon, yang diperkirakan 90 persen lahan hutan yang dideforestasi telah dialihfungsikan sebagai padang rumput untuk pengembalaan ternak (Hofmeiste, Campos, Harari, dan Jordan, 2022). Perusahaan multinasional dalam bidang pengepakan dan pemasaran daging sapi seringkali dianggap sebagai aktor utama dalam rantai pasok yang bertanggung jawab atas deforestasi yang terjadi karena merekalah pembeli utama dalam jumlah dan nilai yang besar. Perusahaan pengepakan daging yang memiliki kontribusi paling besar dalam deforestasi yaitu JBS, Marfig, dan Minerva. Ketiganya merupakan perusahaan Brasil terlibat dalam produksi, pemrosesan dan pengepakan produk pengolahan daging terbesar di dunia dan telah beroperasi secara global, serta memegang sekitar 50 persen produksi daging sapi yang dibesarkan di Hutan Amazon. Mereka berhasil bersaing secara internasional dalam rantai pasok global, dengan menyumbang 65 persen dari jumlah total pemenuhan sumber daya yang tersedia (Angelim, Lima, Laczynski, Boulos, dan Goldfarb, 2021).

Sama halnya dengan industri daging sapi, aktor industri kedelai telah melibatkan berbagai rantai pasok mulai dari petani, kemudian ke pabrik tahap produksi, perusahaan hingga terjual ke seluruh dunia. Petani-petani kedelai seringkali bergantung pada perusahaan multinasional ini untuk mendapatkan benih,

pinjaman, maupun penjualan kedelai. Sebuah studi mengenai rantai pasok produksi kedelai menyebutkan bahwa hanya sebesar 40 persen bisnis kedelai ini dilakukan oleh perusahaan milik Brasil, dan hanya terkonsentrasi pada sektor pertanian misalnya seperti lahan pertanian, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Sedangkan dalam hal teknologi dan perdagangan banyak dipegang oleh perusahaan multinasional (Medina dan Santos, 2017).

Dari segi aktor dan dinamika, rantai pasok kedelai di Brasil memiliki struktur yang kompleks. Di Brasil, secara keseluruhan 91,8 persen budidaya tanaman kedelai merupakan tanaman transgenik (*Genetically Modified Organism*) atau merupakan tanaman hasil persilangan, dan perusahaan multinasional asal Jerman bernama Bayer AG memegang kontrol sebesar 90 persen dari pangsa pasar produksi benih tersebut. Untuk segmen alat-alat berat dan mesin mesin pertanian, pasar telah didominasi oleh perusahaan John Deere dari Amerika Serikat, CNH Industrial dari Amerika Serikat, dan AGCO dari Amerika Serikat. Di Brasil, ketiga perusahaan tersebut pun memegang 99,6 persen pangsa pasar penjualan traktor dan 100 persen pangsa pasar penjualan mesin pemanen kedelai dan mesin penghancur kedelai (Corcioli, Medina, dan Arrais, 2022). Dari segmen pupuk, sebagian besar pupuk yang digunakan oleh agrikultur kedelai adalah impor, yang dipegang oleh The Mosaic Company dari Amerika Serikat (Medina dan Thome, 2021).

Segmen selanjutnya yang paling menjadi sorotan terkait eksploitasi dan deforestasi adalah segmen perdagangan. Meskipun biasanya perusahaan perdagangan multinasional ini tidak terjun langsung dalam pertanian kedelai, pengaruh mereka terhadap perkembangan sektor ini sangat besar. Perusahaan perdagangan multinasional seperti ADM (Archer Daniels Midland) dari Amerika Serikat, Bunge Limited dari Amerika Serikat, Cargill dari Amerika Serikat dan Dreyfuss (Louis Dreyfus Company) dari Prancis atau mereka dikenal sebagai Grup ABCD yang merupakan perusahaan agrikultur paling mendominasi pada segmen pengolahan dan perdagangan kedelai di Brasil. Ditambah COFCO (China National Cereals, Oils, and Foodstuffs Corporation) dari China yang ikut hadir dalam perdagangan kedelai di Brasil (Corcioli, Medina, dan Arrais, 2022). Dari tahun 2005 hingga 2016, terdapat lebih dari 1000 perusahaan yang melakukan ekspor

kedelai dari Brasil, namun tidak lebih dari 40 perusahaan tersebut membawa pengaruh yang signifikan di pangsa pasar.

Faktor tambahan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pertanian dan peternakan ini adalah penerimaan terhadap investasi asing yang memungkinkan perusahaan multinasional menjadi pemain kunci dalam industri. Ketergantungan melihat modal asing dan investasi asing yang diberikan oleh negara maju melalui perusahaan multinasional terhadap negara dunia ketiga hanya akan membawa pada pembangunan yang bergantung. Meskipun awalnya negara dunia ketiga sangat terbantu, tetapi seiring berjalannya waktu investasi dan modal asing tersebut memainkan strategi politik untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara dunia ketiga. Penelitian dari Carbonell dan Werner (2018) menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus investasi asing langsung dan investasi portofolio asing tidak mendorong pertumbuhan ekonomi dari negara tuan rumah. Pandangan skeptis ini dapat terjadi karena sebagian besar investasi disalurkan ke produksi skala besar, sehingga efek negatif dari investasi terasa lebih besar dibandingkan efek positif terutama yang dirasakan oleh petani, peternak atau produsen di tanah mereka sendiri. Di Brasil sendiri telah terjadi demikian. Dorongan peningkatan komoditas ekspor ini telah mengarah pada perkembangan rantai pasok pertanian dan peternakan yang bergantung pada asing. Di sisi lain, partisipasi dan gerakan kelompok domestik menjadi terbatas.

Selain itu, negara juga mengambil bagian dari terciptanya kondisi ketergantungan dengan kondisi ekonomi, politik maupun sosial yang terjadi dari dalam, atau di dalam pengaruh internal. Oleh karena itu dibawah kepemimpinan yang berbeda, dibawah kondisi politik dan ekonomi yang berbeda, akan membawa dampak yang berbeda pula dalam kondisi ketergantungan negara, khususnya yang berhubungan dengan deforestasi.

Luis Inácio Lula da Silva, yang dikenal sebagai Lula da Silva terpilih sebagai Presiden Brasil pada tahun 2003. Lula mengumumkan bahwa Brasil berkomitmen untuk mengurangi deforestasi Amazon hingga 80 persen selama masa kepemimpinannya. Dengan diluncurkannya Amazon Fund, bantuan dana dari negara lain dan efektivitas dari kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan, dari

tahun 2004 hingga 2011, selama masa kepemimpinan Lula deforestasi turun sekitar 70 persen. Kempemimpinan Lula menyebut kebijakan yang digunakan sebagai *command-and-control*, dimana digunakan dalam peraturan dan regulasi untuk mengurangi deforestasi secara berkesinambungan (NBC News, 2022). Jabatannya selesai pada tahun 2011.

Setelah Lula da Silva, Dilma Rousseff menggantikan sebagai presiden wanita pertama Brasil memulai masa pemerintahannya pada tahun 2011. Selama masa kepemimpinannya, ia mengalami banyak tantangan ekonomi dan politik yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Brasil terus melambat, dimana dari tahun 2011 mencapai 3,9 persen hingga turun menjadi 0,1 persen di tahun 2014 (BBC Indonesia, 2017). Sementara itu, di tahun 2013 dan selama pemerintahan Dilma Rousseff, deforestasi perlahan mulai meningkat dan berbanding terbalik dengan pendahulunya. Hal ini didorong pula oleh kondisi politik saat itu yang tutup mata terhadap deforestasi dan menghalangi pemerintah untuk memprioritaskan permasalahan deforestasi. Belum lagi dengan kondisi ekonomi global yang tidak stabil, dan kasus korupsi besar yang menimpa dirinya membuat posisi politik Dilma Rousseff lemah dan dianggap tidak kompeten dalam penyelesaian krisis. Hingga pada Agustus 2016, Dilma Rousseff dimakzulkan dan dilepaskan jabatan sebagai Presiden Brasil oleh Senat.

Michel Temer dilantik sebagai presiden dan menjalani masa jabatan Dilma Rousseff mulai tahun 2016 hingga 2019. Harus meneruskan kepemimpinan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat Michel Temer harus secara cepat dalam sebuah keputusan. Resesi Brasil memaksanya untuk memotong hampir setengah anggaran Kementerian Lingkungan serta pengurangan pekerja di lembaga yang melindungi masyarakat adat Brasil sebagai bagian dari rencana penghematan nasional. Sebagian kebijakan populer di kalangan pebisnis dan investor mulai dikembangkan untuk menyeimbangkan kembali perekonomian Brasil. Bahkan Menteri Kehakiman Presiden Temer mendorong rencana untuk memungkinkan para aktor agrikultur untuk menyewa tanah masyarakat adat untuk dikembangkan menjadi pertanian. (The New York Times, 2019).

Setelah kondisi politik yang tidak menentu dan hadirnya krisis ekonomi, membuat Jair Bolsonaro menjadi salah satu harapan masyarakat dan pendukungnya yang mayoritas adalah elit bisnis untuk memulihkan perekonomian di Brasil. Jair Bolsonaro yang terpilih sebagai Presiden terbaru Brasil dan memulai masa pemerintahannya pada 1 Januari 2019. Ia dikenal sebagai seorang populis sayap kanan, mantan kolonel tentara dan anggota kongres yang acuh terhadap masalah lingkungan terutama terkait deforestasi di Hutan Amazon. Bagian yang tak terpisahkan dari agendanya adalah ia berjanji untuk mempromosikan pembukaan lahan demi meningkatkan pertanian dan pertambangan. Bolsorano mengatakan bahwa Brasil memiliki ‘terlalu banyak kawasan lindung’ yang ‘menghalangi pembangunan’, dan bahwa ‘pengawasan terhadap deforestasi telah berjalan terlalu ketat’ (Al Jazeera, 2022).

Oleh karena itu, Jair Bolsonaro mencoba untuk mengurangi langkah-langkah penegakan hukum, memotong anggaran untuk lembaga lingkungan, memberhentikan para ahli lingkungan, melemahkan hak penduduk asli atas tanah mereka di pedalaman Amazon, dan beberapa kegiatan lain yang mendukung perkembangan industri agrikultur. Bahkan menurut profesor hukum lingkungan, Erika Bechara, pemerintahan Bolsonaro tidak lagi mengikuti PPCDAm dan tidak memiliki tindakan alternatif lain dalam menghadapi deforestasi Amazon (DW News, 2022). Dilansir dari laman berita New York Times (2019) menemukan bahwa tindak penegakan hukum oleh lembaga lingkungan Brasil turun 20 persen selama 6 bulan pertama di tahun 2019. Anggaran IBAMA yang merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab untuk memantau dan mendenda pelanggaran hukum lingkungan Brasil, terutama dalam area Hutan Amazon juga berkurang sebesar 25 persen (Reuters, 2019). Di antara yang dipangkas adalah pendanaan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, yang berkurang sampai 23 persen (tempo.co, 2019). Anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2020 sebesar 3 miliar Real Brasil, sedangkan di tahun 2021 anggaran dipotong menjadi 2,1 miliar Real Brasil (BBC, 2021).

Selama pemerintahan Bolsonaro, perjanjian dagang antara Uni Eropa dan Mercosur atau blok perdagangan Amerika Selatan diantaranya seperti Brasil, Argentina, Uruguay dan Paraguay, akhirnya mencapai persetujuan pada tahun 2019 setelah 20 tahun perundingan. Kesepakatan tersebut pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas bagi agrikultur dan peternakan yang akan memotong tarif, pajak, dan halangan lain bagi produsen negara-negara Mercosur untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa. Akibatnya, kesepakatan tersebut membebaskan beberapa produk agrikultur Brasil dan meningkatkan akses pasar untuk peternakan Brasil (OECD, 2020). Ditambah lagi, Parlemen Brasil menyepakati Rancangan Undang-Undang baru yang melonggarkan regulasi lingkungan untuk sektor pertanian dan energi pada tahun 2021. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut mengatur untuk mengecualikan 13 jenis proyek dari kewajiban permohonan izin lingkungan. Menurut amandemen tersebut, izin dapat diterbitkan secara otomatis jika perusahaan memenuhi sejumlah kriteria (DW News, 2021). RUU ini menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah terus melonggarkan kerusakan hutan Amazon demi perusahaan multinasional sehingga dibawa ke kebijakan.

Faktor sosial dalam masyarakat juga mempengaruhi adanya dorongan bagi pemerintah untuk memutuskan suatu perubahan. Masyarakat memiliki dua pandangan berbeda dalam melihat dan memposisikan diri terkait dengan deforestasi. Pandangan pertama yaitu bahwa hutan menjadi penghambat dalam pembangunan. Pembangunan dalam pandangan ini merupakan kegiatan modern, termasuk pertanian, peternakan dan pertambangan agar menggantikan alam dengan hal yang memberikan pendapatan bagi masyarakat maupun untuk memajukan posisi negara dalam perekonomian global. Pandangan kedua yaitu bahwa hutan memiliki nilai tersendiri, baik secara lokal maupun global. Hutan berperan untuk menjaga iklim global dan regional, serta rumah bagi keanekaragaman hayati. Sebagian besar masyarakat Brasil terbagi kedalam kedua pandangan tersebut dan juga ada membela kedua pandangan (The Conversation, 2020). Namun, kelompok dalam pandangan pertama selalu memainkan peran penting dalam politik Brasil. Dikombinasikan dengan terpilihnya Jair Bolsonaro, agenda dan suara mereka mendapat prioritas dalam pembuatan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa ketergantungan akan hadirnya perusahaan multinasional dalam negara membawa pembangunan yang eksploitatif terutama terhadap deforestasi hutan untuk pengalihfungsian lahan komersil. Dari ketergantungan juga melihat bahwa aliran kapital dari perpanjangan tangan negara maju oleh perusahaan multinasional tidak membawa dampak perkembangan ekonomi yang signifikan bagi negara berkembang, bahkan pemerintah di bawah Jair Bolsonaro memfasilitasi kondisi tersebut dengan perubahan kebijakan yang menguntungkan perusahaan multinasional.

Upaya-upaya untuk mendorong rantai pasok peternakan dan pertanian yang berkelanjutan telah difokuskan pada pendekatan *top – down*, seperti moratorium kedelai, komitmen untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasok daging sapi dan pada perjanjian yang lebih menglobal seperti Perjanjian Paris. Langkah-langkah ini terbukti berhasil dalam beberapa masa, sedangkan disisi lain upaya ini masih butuh peningkatan dalam dua hal, yaitu membuat semua aktor bertanggung jawab dalam permasalahan deforestasi, termasuk perusahaan multinasional dan mengeksplorasi timbal baik antara deforestasi dengan perkembangan sektor kedelai dan daging sapi terhadap peningkatan ekonomi domestik, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan yang bahkan tidak membawa keuntungan yang signifikan bagi negara. Sehingga pemerintah Brasil dihadapkan pada kepentingan yang dilematis, antara ekonomis atau ekologis dan pembangunan atau penghancuran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S. Sos., M.A selaku dosen pembimbing 1, Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing 2 dan Ibu Dr. Hartuti Purnaweni, MPA selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Al Jazeera. (2020). "Deforestation in Brazil's Amazon surges to 12-year high". Retrieved 20 April 2021, from <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/30/deforestation-in-brazils-amazon-to-12-year-high-under-bolsonaro>.
- Angelim, D., E Lima, D. A., Laczynski, P., Boulos, R., & Goldfarb, Y. (2021). Invisible hands? European corporations and the deforestation of the Amazon and Cerrado biomes. European Network of Corporate Observatoires (ENCO).
- Al Jazeera. (2022). Brazil authorities doing little to prevent deforestation: Report. Retrieved October 19, 2022, from <https://www.aljazeera.com/news/2022/7/20/brazil-authorities-doing-little-to-prevent-deforestation-report>
- BBC News. Gallas, D. (2017, October 25). Brazil's Michel Temer: A master of survival. Retrieved January 17, 2023, from <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-41748838>
- BBC News. Giles, C., & Goodman, J. (2020). "Amazon fires: Are they worse this year than before?". Retrieved 7 March 2021, from <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53893161>.
- BBC News. (2021, April 24). Brazil cuts environment budget despite climate summit pledge. Retrieved October 14, 2022, from <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56847958>
- Bermejo Carbonell, J., & Werner, R. A. (2018). Does foreign direct investment generate economic growth? A new empirical approach applied to Spain. *Economic Geography*, 94(4), 425-456. doi:10.1080/00130095.2017.1393312
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and development in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Carvalho, W. D., Mustin, K., Hilário, R. R., Vasconcelos, I. M., Eilers, V., & Fearnside, P. M. (2019). Deforestation control in the Brazilian amazon: A conservation struggle being lost as agreements and regulations are subverted and bypassed. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 17(3), 122–130. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2019.06.002>
- Centeno, M. A. (2017). Dependency Theory Today, in Kufakurinani, U., Kvangraven, I. H., Santana, F., Dyveke Styve, M. (Eds.). *Dialogues on Development Volume I: Dependency*. 72-78. Young Scholars Initiative. Institute for New Economic Thinking (INET)
- Chain Reaction Research. Brazilian beef supply chain under pressure amid worsening ESG impacts. (2020, September 14). Retrieved August 1, 2022, from <https://chainreactionresearch.com/report/brazilian-beef-supply-chain-under-pressure-amid-worsening-esg-impacts/>
- CNBC Indonesia. Putri, A. M. H. (2023, January 30). Indonesia Kalah Jauh, Negara Ini Produsen kedelai terbesar. CNBC Indonesia. Retrieved April 1, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230130070205-128-409121/indonesia-kalah-jauh-negara-ini-produsen-kedelai-terbesar>
- Corcioli, G., Medina, G. D., & Arrais, C. A. (2022). Missing the target: Brazil's agricultural policy indirectly subsidizes foreign investments to the detriment of smallholder farmers and local agribusiness. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5. doi:10.3389/fsufs.2021.796845
- DW News. (2021, May 15). Longgarkan regulasi, Brasil Percepat komersialisasi amazon – DW – 15.05.2021. Retrieved February 23, 2023, from <https://www.dw.com/id/longgarkan-regulasi-brasil-ingin-percepat-komersialisasi-hutan-amazon/a-57530955>

- DW News. Eisele, I. (2022, October 03). How has the rainforest fared under Bolsonaro? – DW – 10/02/2022. Retrieved December 11, 2022, from <https://www.dw.com/en/how-has-the-amazon-rainforest-changed-under-jair-bolsonaro/a-63211783>
- Greenpeace. Greenberg, C. (2023, February 17). The Amazon - and our future - is being burned for profit. Greenpeace International. Retrieved March 30, 2023, from <https://www.greenpeace.org/international/story/55533/amazon-rainforest-fires-2022-brazil-causes-climate/>
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hatami, M.I. (2019). *Pengaruh Kebijakan Investasi Asing Era Bolsorano Terhadap Deforestasi Hutan Amazon*.
- Hettne, B. (1990). *Teori Pembangunan Dan Tiga Dunia* (pp. 146-166). Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Husna, N. (2020). *Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brasil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkungan Global*
- Kompas.com. Anwar, M. (2022, January 12). Daftar Negara penghasil Daging Sapi terbesar di Dunia. Retrieved December 1, 2022, from <https://money.kompas.com/read/2022/01/12/151437426/daftar-negara-penghasil-daging-sapi-terbesar-di-dunia?page=all>
- Le Tourneau, F. (2016). Is Brazil now in control of deforestation in the Amazon? *Cybergeog*. doi:10.4000/cybergeog.27484
- Medina, G., and Santos, A. (2017). Curbing enthusiasm for brazilian agribusiness: the use of actor-specific assessments to transform sustainable development on the ground. *Appl. Geogr.* 85, 101–112. doi: 10.1016/j.apgeog.2017.06.003
- Medina, G., & Thomé, K. (2021). Transparency in global agribusiness: Transforming Brazil's soybean supply chain based on companies' accountability. *Logistics*, 5(3). doi:10.3390/logistics5030058
- Mongabay. Kimbrough, L. (2021, June 10). As 2020 amazon fire season winds down, Brazil Carbon Emissions Rise. Retrieved July 10, 2022, from <https://news.mongabay.com/2020/11/as-2020-amazon-fire-season-winds-down-brazil-carbon-emissions-rise/>
- Namkoong, Y. (1999). Dependency theory: Concepts, classifications, and criticisms. *International Area Review*, 2(1), 121–150. <https://doi.org/10.1177/223386599900200106>
- NBC News. Chow, D. (2022, October 31). Why Brazil's election is a major victory in the fight against climate change. Retrieved January 20, 2022, from <https://www.nbcnews.com/science/environment/brazils-election-major-victory-fight-climate-change-rcna54860>
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2020). *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020*. Paris: OECD Publishing.
- Putri, K.Y. (2015). *Diplomasi Greenpeace dalam Menekan Deforestasi Amazon akibat Agrikultur Kedelai di Brazil*.
- Quaralia, P. S. (2022). Kerjasama regional Dalam Rantai pasokan Pertanian Untuk Mencapai Ketahanan Pangan berkelanjutan: Studi Kasus ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(1). doi:10.24198/padjir.v4i1.37614
- Reuters. Spring, J. (2019). Brazil deforestation exceeds 88% in June under Bolsonaro. Retrieved March 1, 2020, from <https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-idUSKCN1TY1VU>

- Reuters. Spring, J., & Eisenhammer, S. (2019). Exclusive: As fires race through Amazon, Brazil's Bolsonaro Weakens Environment Agency. Retrieved August 21, 2022, from <https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-ibama-exclusive-idUSKCN1VI14I>
- Skidmore, M. E., Moffette, F., Rausch, L., Christie, M., Munger, J., & Gibbs, H. K. (2021). Cattle ranchers and deforestation in the Brazilian amazon: Production, location, and policies. *Global Environmental Change*, 68. doi:10.1016/j.gloenvcha.2021.102280
- Soler, L., Verburg, P., & Alves, D. (2014). Evolution of land use in the Brazilian amazon: From Frontier Expansion to market chain dynamics. *Land*, 3(3), 981-1014. doi:10.3390/land3030981
- Subramanian K, S. (2018). "The Crisis of Consumption of Natural Resources". *International Journal of Recent Innovations in Academic Research* 2(4).
- Tempo.co. Saputra, E. Y. (2019, August 29). Jair Bolsonaro pangkas Anggaran Untuk perlindungan hutan amazon. Tempo.co. Retrieved January 2, 2023, from <https://dunia.tempo.co/read/1241476/jair-bolsonaro-pangkas-anggaran-untuk-perlindungan-hutan-amazon>
- The Conversation. Guerrero, A., & Sawmy, M. (2020). "Demand for meat is driving deforestation in Brazil – changing the soy industry could stop it". Retrieved 21 April 2021, from <https://theconversation.com/demand-for-meat-is-driving-deforestation-in-brazil-changing-the-soy-industry-could-stop-it-151060>.
- The Guardian. Wasley, A., Jordan, L., & Mendonça, E. (2022, January 14). Feed supplier to UK farm animals still linked to Amazon deforestation. Retrieved November 12, 2022, from <https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/14/feed-supplier-to-uk-farm-animals-still-linked-to-amazon-deforestation>
- The New York Times. Krauss, C., Yaffe-bellany, D., & Simões, M. (2019, October 10). Why Amazon fires keep raging 10 years after a deal to end them. Retrieved December 20, 2022, from <https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html>
- Unearthed. Campos, A., Hofmeiste, N., Harari, I., & Jordan, L. (2022, November 14). JBS admits to buying almost 9,000 cattle from 'one of Brazil's biggest deforesters'. Retrieved December 20, 2023, from <https://unearthed.greenpeace.org/2022/11/11/jbs-cattle-brazils-biggest-deforester-amazon/>
- Valenzuela, J. S., & Valenzuela, A. (1978). Modernization and Dependency: Alternative Perspectives in the Study of Latin American Underdevelopment. *Comparative Politics*, 10(4), 535–557. <https://doi.org/10.2307/421571>
- West, T. A., & Fearnside, P. M. (2021). Brazil's conservation reform and the reduction of deforestation in Amazonia. *Land Use Policy*, 100. doi:10.1016/j.landusepol.2020.105072
- WWF. Pacheco, P., Mo, K., Dudley, N., Shapiro, A., Aguilar-Amuchastegui, N., Ling, P.Y., Anderson, C. and Marx, A. (2021). *Deforestation fronts: Drivers and Responses In a Changing World*. WWF, Gland, Switzerland.